
ANALISIS KONSEP ARSITEKTUR *NEO-VERNACULAR* PADA PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI JEPARA

Muhammad Rizqi

Program Studi Ilmu Seni Dan Arsitektur Islam
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Walisongo
muhammad_rizqi_2004056017@walisongo.a
c.id

ABSTRAK

Arsitektur *Neo-vernacular* merupakan suatu gerakan yang berkembang pada masa postmodernisme, yaitu gerakan arsitektur yang muncul pada pertengahan tahun 1960-an. Postmodernisme muncul sehubungan dengan protes para arsitek modernis terhadap model-model yang terkesan monoton (bangunan berbentuk balok), yang diyakini tidak memiliki karakter yang dapat membedakan bangunan dengan bangunan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode perancangan J. Zeisel. Dalam hal ini penerapan arsitektur neo-vernacular pada pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara yaitu dengan mengaplikasikan atap joglo dari bangunan Masjid Astana Sultan yang memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa dikombinasikan dengan ornamen motif dari batik blangket troso yang merupakan juga salah satu ciri khas dari Kabupaten Jepara sendiri. Disisi lain pada bangunan gedung utama terinspirasi dari sarana transportasi “Kapal” yang mana menggambarkan sebagian besar masyarakat jepara adalah sebagai nelayan. Perancangan Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara melalui pendekatan Arsitektur Neo-vernacular bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal untuk masyarakat juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menjaga dan melestarikan corak budaya lokal pada era yang semakin modern dalam segala aspek terutama segi infrastruktur agar tidak tergerus oleh zaman dan hilang terlupakan di masa mendatang.

KATA KUNCI: Arsitektur Neo-vernacular, Mall Pelayanan Publik Jepara.

Neo-vernacular architecture is a movement that developed during postmodernism, an architectural movement that emerged in the mid-1960s. Postmodernism emerged in connection with the protest of modernist architects against monotonous models (block-shaped buildings), which were believed to have no character that could distinguish buildings from other buildings. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis. In this case the application of neo-vernacular architecture in the construction of the Public Service Mall Building "MPP" in Jepara Regency is by applying the joglo roof of the Astana Sultan Mosque building which has a mixed architectural style of Hindhu-Buddhist, Javanese and Chinese cultures combined with motif ornaments from troso blangket batik which is also one of the characteristics of Jepara Regency itself. On the other hand, the main building of the Public Service Mall is inspired by the means of transportation "Ship" which describes most of the Jepara people as fishermen. The design of the Public Service Mall "MPP" in Jepara Regency through the Neo-vernacular Architecture approach aims to provide more optimal services for the community and is also expected to be used as one of the solutions to maintain and preserve local cultural patterns in an increasingly modern era in all aspects, especially in terms of infrastructure so as not to be eroded by the times and lost to oblivion in the future.

KEYWORDS: Neo-vernacular Architecture, Jepara Public Service Mall Building.

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang sudah diatur dalam UU terkait dengan pelayanan publik yaitu UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa “negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang

merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Mall Pelayanan Publik “MPP” merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat

maupun daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, serta aman dan nyaman.

Berdirinya Mall Pelayanan Publik “MPP” merupakan suatu bentuk perjalanan pembaharuan serta sebuah langkah yang strategis terutama bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Hal ini dikarenakan, MPP telah memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Disisi lain, menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 secara tidak langsung menuntut pelayanan yang cepat, mudah serta akuntabel yang mana dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dimana Kabupaten tersebut berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di timur, serta Kabupaten Demak di selatan. Selain itu, wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa yang berada di Laut Jawa dan untuk Kabupaten Jepara sendiri mempunyai luas sebesar 27.263 km². Untuk menunjang serta menciptakan Kabupaten Jepara yang lebih maju dan semakin berkembang tentu saja perlu ditunjang dengan adanya infrastruktur yang memadai terlebih dari segi infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat contohnya Mall Pelayanan Publik “MPP”. Namun perlu diketahui bahwa dalam rangka mewujudkan serta menciptakan layanan publik yang prima, disisi lain juga perlu untuk selalu adaptif serta berinovasi terhadap segala macam bentuk perubahan terutama pada era globalisasi yang mana untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik agar semakin maju dan optimal ke depannya.

Masalah yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Mall Pelayanan Publik “MPP” yang terdapat di Kabupaten Jepara berdasarkan pelayanan dan kebutuhan masyarakat pada jangka panjang 5-10 tahun ke depan terkait gedung tersebut tentu saja sudah tidak layak pakai tentu saja perlu dilakukan pembaharuan, serta inovasi lebih lanjut. Disamping itu, kebutuhan akan ruang serta fasilitas yang kurang memadai juga menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagaimana apa yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya dengan tanpa melakukan penggusuran terhadap gedung-gedung yang sudah ada sebelumnya.

Untuk menciptakan inovasi baru dalam proses pembangunan infrastruktur gedung Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara nantinya, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan tema Arsitektur

Neo-Vernakular yaitu dengan mengaplikasikan atap joglo dari bangunan Masjid Astana Sultan yang memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa dikombinasikan dengan ornamen motif dari batik blangket troso yang merupakan juga salah satu ciri khas dari Kabupaten Jepara sendiri. Disisi lain pada bangunan gedung utama terinspirasi dari sarana transportasi “Kapal” yang mana menggambarkan sebagian besar masyarakat jepara adalah sebagai nelayan. Diharapkan melalui pendekatan dengan konsep Arsitektur *Neo-vernakular* dalam proses pembangunan Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara tersebut disamping memberikan manfaat pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat juga diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjaga dan melestarikan corak budaya lokal di era modernisasi yang semakin meningkat di segala aspek, terutama dalam bidang infrastruktur.

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis bagaimana rancangan wadah fisik Mall Pelayanan Publik “MPP” di Kabupaten Jepara yang berkonsep satu pintu yang mana tentu saja dapat mempersingkat, menyederhanakan, dan membawa segala macam bentuk persoalan pelayanan serta menganalisis rancangan dan kompleksitas bangunan Mall Pelayanan Publik atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik itu dari segi lokasi, program ruang, sirkulasi dan bidang-bidang arsitektur lainnya, sehingga mampu memwadahi kegiatan-kegiatan penggunanya.

Selain itu, jika melihat peta kondisi Kabupaten Jepara dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh kantor pelayanan publik di Kabupaten Jepara tersebar dan terkonsentrasi di Sepanjang Jalan Pemuda - Jalan Kartini. Disisi lain, khususnya di wilayah pinggiran Kabupaten Jepara yang bisa dikatakan cukup terpencil problematika muncul bilamana masyarakat dengan data yang cukup beragam mengirimkan surat administrasi yang secara tidak langsung menunjukkan ketidakefisienan baik itu dari segi waktu maupun tempat. Berdasarkan uraian-uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyelesaikan landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur tersebut dengan judul “PERANCANGAN MALL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEPARA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *NEO-VERNAKULAR*”.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Mall Pelayanan Publik

Mall Pelayanan Publik merupakan tempat diadakannya kegiatan maupun pelaksanaan pelayanan publik dalam bentuk barang/jasa dan atau pelayanan yang merupakan peningkatan kemampuan administrasi yang terkoordinasi baik dari pusat maupun daerah, serta pelayanan

BUMN/BUMD dan perusahaan milik swasta dalam penyediaan pelayanan yang cepat, sederhana, mudah, terjangkau, aman dan nyaman (Utami, 2020).

Salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas dari sistem birokrasi di Indonesia yaitu dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik yang mana menganut prinsip-prinsip sebagai berikut (Ristiani, 2020) :

1. Sederhana, yaitu pelayanan yang mudah diikuti, lugas, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan metode yang jelas serta biaya yang wajar untuk wilayah dan koordinator setempat.
2. Partisipatif, yaitu penataan prinsip pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat setempat dan pertemuan terkait untuk mengkaji dan mendapatkan kesepakatan berdasarkan hasil runding bersama.
3. Akuntabel, yaitu hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. Transparansi, standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
5. Keadilan, yaitu pedoman pelayanan harus menjamin bahwa administrasi yang diberikan dapat menjangkau semua individu dengan status keuangan yang berbeda, jarak wilayah geografis, dan perbedaan kemampuan fisik ataupun mental.

B. Arsitektur Neo-vernakular

Arsitektur Neo-Vernakular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosofi, tata ruang) dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaharuan menuju suatu karya yang lebih modern/maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat. Neo-Vernacular berasal dari Bahasa Yunani dan digunakan sebagai fonim yang berarti baru. Atau dalam artian lain bahwa Neo-Vernacular berarti bahasa setempat yang diucapkan dengan cara baru, arsitektur Neo-Vernacular adalah suatu penerapan elemen arsitektur yang telah ada, baik fisik (bentuk, konstruksi) maupun non fisik (konsep, filosofi, tata ruang) dengan tujuan melestarikan unsur-unsur lokal yang telah terbentuk secara empiris oleh sebuah tradisi yang kemudian sedikit atau banyaknya mengalami pembaruan menuju suatu karya yang lebih modern atau maju tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi setempat.

Pembaharuan ini dapat dilakukan dengan upaya eksplorasi yang tepat. (Tjok Pradnya Putra dalam jurnal berjudul Pengertian Arsitektur NeoVernacular.

Menurut Charles Jenks dalam bukunya "*language of Post-Modern Architecture (1990)*", terdapat beberapa ciri-ciri Arsitektur Neo-Vernakular sebagai berikut: (Jenks,1991)

1. Menggunakan atap bubungan, atap memiliki tritisan yang memanjang ke arah permukaan tanah yang menutupi dinding, sehingga dii Tengah kan sebagai elemen pelindung dan penyambut.
2. Penggunaan batu bata.
3. Menggunakan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal.
4. Kesatuan antara interior dengan ruang luar yang ada disekitarnya.
5. Warna-warna yang kuat dan kontras.

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernakular tidak ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lebih pada keduanya. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan jelas dan tepat oleh Neo-Vernakular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian kembali. Mendapatkan unsur-unsur baru dapat dicapai dengan pencampuran antara unsur setempat dengan teknologi modern, tapi masih mempertimbangkan unsur setempat. Ciri- ciri :

1. Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen).
2. Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non-fisik yaitu budaya, pola pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan.
3. Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru (mengutamakan penampilan visualnya).

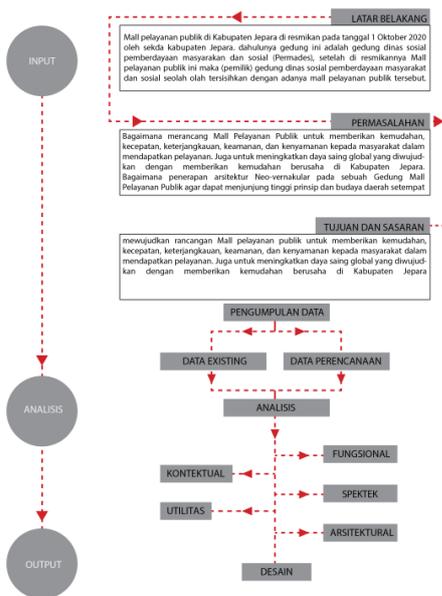
Menurut Deddy Erdiono dalam Jurnal berjudul Arsitektur 'Modern' (*Neo Vernacular*) di Indonesia,

menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) pendekatan yang harus diperhatikan terkait dengan bentuk dan makna dalam merancang bangunan yang mengambil elemen-elemen fisik maupun non-fisik dari bangunan tradisional dalam konteks modern atau ke-kini-an (Erdiono, 2011) diantaranya yaitu bentuk dan maknanya tetap, bentuk dan makna bangunan masih tetap, Bentuk tetap dengan makna baru. makna yang diambil merupakan makna baru yang didapat dari adopsi budaya dan nilai-nilai asing, Bentuk baru dengan makna tetap, Bentuk dan maknanya baru

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam perencanaan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara yaitu metode perancangan J. Zeisel (Zeisel, 2006) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Objek Perancangan : Mall Pelayanan Publik yang mana berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik itu dalam bidang jasa maupun barang.
2. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan : Dalam perancangan digunakan dua jenis data yaitu data existing dan data perencanaan.
3. Teknik Analisis Sintesis : Analisis yang dilakukan didalam perancangan meliputi analisis site, analisis konsep bangunan, analisis pengguna, analisis ruang, analisis bentuk, analisis struktur, analisis aksesibilitas, dan analisis utilitas.
4. Tahapan Perencanaan : Tahapan perencanaan dimulai dengan identifikasi permasalahan, tujuan perancangan, pengumpulan data, analisis, konsep, pra perancangan dan pengembangan rancangan.



Gambar 1. Alur pikir
Sumber: Penulis, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Proyek

1. Gambaran Umum Site

- a. Peruntukan : Gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara
- b. Luas Tapak : kurang lebih 18.699 m²
- c. Luas Lahan : 18.699 m²

2. Lokasi dan Site Terpilih



Gambar 2. Lokasi site
Sumber : Penulis, 2023

Keterangan:

- a. Utara : Hotel Kalingga Star
- b. Selatan : Inspektorat Kabupaten Jepara
- c. Timur : Perpustakaan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Barat :Hotel Syailendra.

Site yang mudah terjangkau dikarenakan berada di titik pusat kota disamping itu dekatnya dengan beberapa fasilitas sebagai penunjang dalam perancangan tapak dimana nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk berkunjung ke tempat tersebut.

B. Analisa Fungsional “Program Ruang”

1. Ernst Neufert, Data Arsitek (DA).
2. *Time saver standars building standars for building* (TSS).
3. Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Sarana prasarana kantor.

C. Analisa Site

1. Aksesibilitas

Lokasi site dengan ruang-ruang yang penuh tentu saja membutuhkan ruang korelasi dari satu tempat ke tempat lainnya, terutama bagi pejalan kaki. Oleh sebab itu, nantinya trotoar sepanjang Jalan akan tetap dipertahankan dan didukung dengan melakukan penghijauan agar memberikan rasa nyaman terkhusus bagi pejalan kaki.

2. Sirkulasi

Untuk akses masuk dan keluar kawasan akan di pisah dengan jalur yang berbeda, hal ini dikarenakan agar pengguna kendaraan dapat mengelilingi kawasan tersebut serta mengenal lebih dekat area site. Dan untuk pejalan kaki sendiri akan di berikan fasilitas *sitting area* pada *point of view* agar tercipta rasa aman serta nyaman bagi pengunjung yang datang ke kawasan tersebut.

3. Vegetasi

Dikarenakan minimnya vegetasi di area site tersebut, yang mana dari hal tersebut tentu saja diperlukan tumbuhan-tumbuhan baik itu tumbuhan peneduh, pengarah dan hias dengan tujuan tidaklah lain untuk memfilter polusi udara, meminimalisir kebisingan pada area site dan disisi lain juga untuk memberikan kenyamanan termal pada kawasan tersebut.

4. View

Untuk view luar hanya bisa dinikmati area luar saja (fasad). Namun, untuk view dalam akan dimaksimalkan mungkin yaitu pada bagian *point of view*, *volliage* sebagai *shadding*, *reflection poll* untuk membiaskan matahari. Di samping itu, juga memberikan *sequences* serta rileks ruang agar pengunjung dengan adanya ruang terbuka dapat merasa bebas hijau

5. Orientasi Matahari

Dalam hal ini mengenai desain bangunan menghadap selatan yang mana agar Memaksimalkan bukaan serta memberikan *skylight* untuk taman indoor dengan tujuan memberikan pencahayaan alami, Memberikan *shadding* dengan menggunakan *volliage* untu menambah sirkulasi udara yang masuk, kemudian menggunakan material seperti *glass block sandblast* maupun *clear*.

6. Penghawaan

Untuk meredam panas dari sinar matahari dalam hal ini menggunakan "*Reflection poll*" agar penguapan dari air tersebut dapat memberikan efek sejuk pada sekitar area tersebut.

7. Kebisingan

Untuk meminimalisir kebisingan yang terjadi di area site dalam hal ini diperlukan langkah yaitu:

- Arah selatan : memberikan tanaman penghalang misalnya tanaman perdu, pucuk merah, ketapang dll.
- Arah barat : cukup memberikan pembatas tanaman hias agar pengunjung tetap bisa menikmati kawasan tersebut.

D. Analisa Spesifikasi dan Teknis

Ruang lingkup mengenai analisa spesifikasi dan teknis diantaranya yaitu untuk pekerjaan beton dengan membuat 1 m³ beton mutu K-250 – K300, lingkup pekerjaan (tenaga kerja, bahan, peralatan, alat bantu, pekerjaan beton bertulang sesuai petunjuk) Dalam hal ini penulis menggunakan standar rujukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pemasangan Batu dan Peraturan Beton Indonesia 1971.

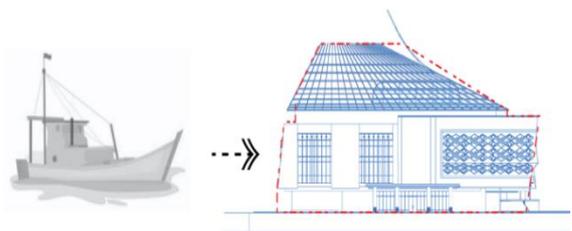
Mengenai syarat pelaksanaan pekerjaan meliputi cetakan begisting, pemberitahuan tentang pelaksanaan pengecoran, kelas dan mutu beton, cara pengadukan dan pengecoran beton dan yang terakhir yaitu pengujian.

E. Analisa Aspek Kinerja (Utilitas)

Pendekatan dalam perencanaan dan perancangan dari konsep utilitas yaitu dengan tujuan tidaklah lain untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan pemilik, pengelola dan pemakai bangunan. Memenuhi persyaratan kenyamanan, *safety*, *security*, serta persyaratan/peraturan yang berlaku dan kriteria perencanaan. Memenuhi standard umum *engineering* dan memenuhi peraturan-peraturan Kabupaten Jepara dsb.

F. Analisa Arsitektural

1. Pengembangan prinsip budaya lokal

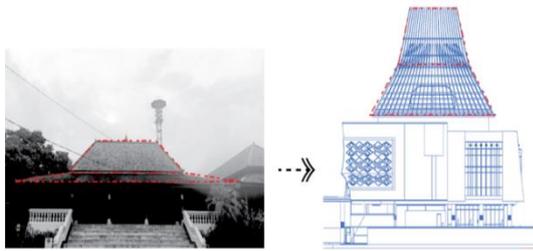


Gambar 3. Bentuk bangunan utama
Sumber penulis, 2024.

Untuk bangunan utama sendiri dalam hal ini penulis terinspirasi dari sebuah kapal yang mana menggambarkan dari kondisi sebagian besar masyarakat Jepara bermata pencaharian sebagai nelayan dan disisi lain Kabupaten Jepara

memang sangat potensial dalam bidang kenelayanan.

2. Implementasi atap joglo



Gambar 4. Implementasi atap joglo
Sumber penulis, 2024

Penulis terinspirasi dari salah satu bangunan masjid kuno yang terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yaitu Masjid Mantingan (Masjid Astana Sultan Hadirin) yang mana masjid tersebut memiliki gaya arsitektur campuran dari kebudayaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa.

3. Motif Batik Blangket Troso



Gambar 5. Motif batik blangket troso
Sumber penulis, 2024.

Tenun troso merupakan kain tenun khas dari kota Jepara. Dalam hal ini penulis mengambil motif tenun batik blangket troso khas sebagai hiasan ornamen dari pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara dengan tujuan untuk memperindah bagian dari sebuah gedung juga untuk memperkenalkan serta melestarikan kepada masyarakat luas bilamana di Kota Jepara bukan hanya ukiran saja yang menjadi ciri khas dari Kota Jepara sendiri melainkan disini lain juga terdapat kain tenun troso yang menjadi ciri khas dari Kota Jepara.

Gambar Rancangan

Berikut beberapa gambar eksterior, interior, maupun *Co-working* dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jepara :

1. Perspektif Eksterior Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jepara



Gambar 6. Eksterior Mall Pelayanan Publik tampak depan. Sumber : Penulis, 2024



Gambar 7. Eksterior Mall Pelayanan Publik tampak samping kanan dan kiri. Sumber : Penulis, 2024

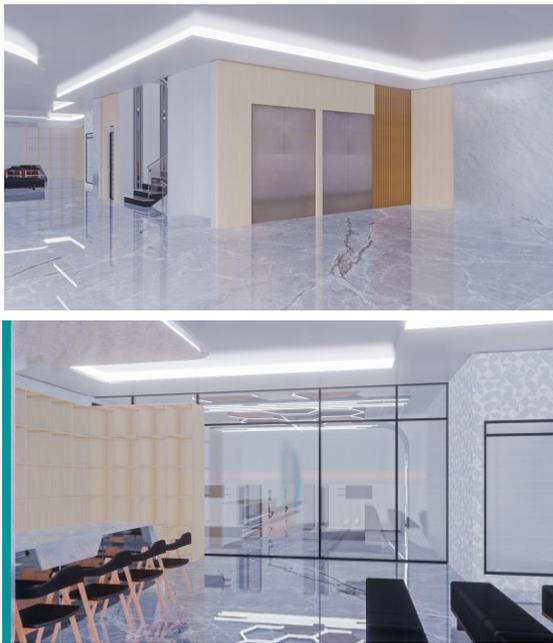
2. Perspektif Interior Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jepara



Gambar 8. Ruang tunggu pelayanan Mall Pelayanan Publik. Sumber: Penulis, 2024.



Gambar 9. Musholla Mall Pelayanan Publik
Sumber : Penulis, 2024.



Gambar 10. Sudut ruang dalam Mall Pelayanan Publik.
Sumber: Penulis, 2024

KESIMPULAN

Dari penjelasan penulis sebelumnya mengenai latar belakang dibangunnya Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan dan menciptakan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat yang berarti pelayanannya cepat, secara alami sederhana, terjangkau, aman dan nyaman. Dari hal tersebut, tentu saja diperlukan sebuah langkah yang diambil agar tetap bisa beradaptasi dan inovatif dengan tidak melupakan prinsip-prinsip dari MPP itu sendiri yang berupa keterpaduan, efisiensi, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kemudahan terlebih mengingat bahwa segala macam perubahan di era globalisasi yang semakin maju.

Mengenai pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara penulis mengusung konsep melalui pendekatan Arsitektur Neo-vernakular

dengan mengaplikasikan atap joglo dari bangunan masjid Astana Sultan yang memiliki gaya campuran dari kerajaan Hindhu-Buddha, Jawa dan Tionghoa dikombinasikan dengan ornamen dari batik blangket troso yang merupakan juga salah satu ciri khas dari Kabupaten Jepara sendiri. Disisi lain pada bangunan gedung utama terinspirasi dari sarana transportasi "Kapal" yang mana menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Jepara adalah sebagai nelayan.

Pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara dengan melalui pendekatan arsitektur Neo-vernakular diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih ideal untuk masyarakat setempat dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menjaga dan melestarikan corak budaya lokal agar tidak tergerus perkembangan zaman yang semakin modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Erdiono, D. (2011). Arsitektur "Modern" (Neo) Vernakular Di Indonesia. *Jurnal Sabua* Vol.3.
- Jencks, C. *The Language Of Post-modern architecture*. New York: Rizzoli
- Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Ristiani, I. Y. (2020). Manajemen Pelayanan Publik Pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition, Vol XI*, Nomor 2, 165-178
- Tjok Pradnya Putra, (2013) Pengertian Arsitektur Neo Vernakular.
<https://www.scribd.com/doc/135985062/Pengertian-Arsitektur-Neo-Vernakular>. Diakses pada tanggal 22 November 2023.
- Utami, R. T. (n.d.). Perancangan Pusat Perbelanjaan Modern Pelayanan Publik di Wonogiri Jawa Tengah. *Seminar Nasional Komunitas dan Kota Berkelanjutan*, 669.
- Zeisel, J. (2006). *Inquiry by design: Environment/behavior/neuroscience in architecture, interiors, landscape, and planning*. New York: W. W. Norton & Company